

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

INDRA DARMAWAN¹, SAHRI², IWAN HARSONO³*, MUHAMMAD IRWAN⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

¹indradarmawan76@yahoo.com, ²sahri.feb@unram.ac.id

³iwanharsono@unram.ac.id*(Corresponding author), ³dae_irwan@unram.ac.id

ABSTRAK

Kinerja keuangan Indonesia cukup lemah, sebagian besar karena keadaan ekonomi makro. Penilaian Pertambahan Nilai mewakili $\pm 40\%$ dari total pendapatan pengeluaran di Indonesia, namun selama 10 tahun terakhir, pelaksanaan Bea Pertambahan Nilai Penting di wilayah Nusa Tenggara Barat bervariasi dan secara umum akan berkurang pada tahun 2017, 2019 dan 2020. Kajian ini dimaksudkan untuk menguraikan pengaruh perkembangan dan inflasi keuangan terhadap pelaksanaan bermacam-macam pungutan bernilai tambah yang signifikan di Wilayah Nusa Tenggara Barat. Kajian ini memanfaatkan informasi opsional dari Badan Pengukuran dan informasi ke dalam dari penilaian Direktorat Jenderal Pajak sebagai kuantitas substansi bisnis yang tersedia, kuantitas daerah kontrol dan dorongan biaya dari tahun 2011 hingga 2022 yang ditunjukkan oleh strategi ARDL-ECM. Metode dengan uji asosiasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi berdampak pada pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai dalam jangka panjang dan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi berdampak positif dan signifikan sedangkan inflasi berdampak negatif dan signifikan.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PPN, ARDL-ECM.*

ABSTRACT

Indonesia's financial performance has been weak, largely due to the state of the macro economy. Value Added Assessment represents $\pm 40\%$ of total revenue and expenses in Indonesia, but over the last 10 years, the implementation of Import Duty Value Added in West Nusa Tenggara has varied and will generally decrease in 2017, 2019 and 2020. This study is intended to describe the effect of financial development and expansion on the implementation of various significant value-added levies in the West Nusa Tenggara Region. This study utilizes optional information from the Measurement Agency and inside information from the Directorate General of Taxes' assessment as the quantity of available business substance, quantity of control areas and cost drives from 2011 to 2022 indicated by the ARDL-ECM strategy. method with association test. The results of this study indicate that economic growth and inflation have an impact on the implementation of value added tax collection in the long term and short term. Economic growth has a positive and significant impact while inflation has a negative and significant impact.

Keywords: *Economic Growth, Inflation, Value-Added Tax Receipts VAT, ARDL-ECM.*

PENDAHULUAN

Masyarakat yang maju dan sejahtera adalah dambaan hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Negara diharapkan melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk memahami keyakinan tersebut. Salah satu alat moneter untuk mewujudkan kebebasan negara yang sedang dikembangkan adalah modal dalam negeri sebagai biaya. Retribusi merupakan sumber utama penerimaan negara, dengan hampir 90% bagian penerimaan dan penggunaan negara (APBN) termasuk penerimaan dari pengeluaran, bea dan ekstrak, PNB dan alokasi. Penghasilan biaya digunakan oleh badan legislatif untuk menginvestasikan sumber daya, mengurangi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan, memberikan dukungan publik, dan membangun fondasi untuk pembangunan jangka panjang. Pendapatan pungutan di Indonesia sebagian besar mencakup tarif tahunan (PPH), pungutan harga tambah (PPN), dan pungutan jual beli barang mewah (PPnBM), pungutan tanah dan bangunan (PBB) dan pungutan lainnya, kecuali transaksi pungutan ekstrak dan devisa global.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah penting untuk penilaian bundaran dan diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan biaya kesepakatan (Mardiasmo 2019). Hampir semua kebutuhan hidup masyarakat Indonesia adalah barang-barang yang bergantung pada pajak saat diangkut. Setiap orang, terlepas dari Nomor Pokok Wajib Warga Negara (NPWP), bergantung pada pajak dan wajib membayar pajak sambil mengonsumsi tenaga dan produk. Tentu saja, biaya dari individu akan dikembalikan ke individu melalui peningkatan sesuai kemampuan realokasi pendapatan biaya.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah merupakan faktor utama yang membuat orang miskin tidak keluar dari kemiskinan, kemajuan keuangan diharapkan dapat mengalahkan pengangguran dan bekerja pada bantuan pemerintah individu (Arsyad 2016), sehingga individu dapat mengelola biaya penggunaan dan biaya. Laju peningkatan keuangan suatu negara biasanya dikomunikasikan oleh laju perkembangan pembayaran per kapita yang tercermin dalam laju perkembangan PDB (produk domestik bruto).

Inflasi adalah bagian dari pelaksanaan ekonomi makro dan variabel yang signifikan dalam merinci pendekatan keuangan. Inflasi menggambarkan keadaan keuangan ketika biaya umum naik. Tingkat inflasi adalah tingkat perubahan tingkat biaya pada waktu tertentu dibandingkan dengan tingkat biaya kerangka waktu lalu. Keganjilan moneter keseluruhan yang terjadi ketika keadaan inflasi tinggi mendorong upah spesialis untuk mengelola daya beli individu, sesuai dengan hipotesis Aturan Cemerlang (Phelp 1961) bahwa individu pada umumnya akan meningkatkan pemanfaatan per kapita.

Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang saat ini sedang berkembang di berbagai bidang. Metodologi pengembangan wilayah Nusa Tenggara diharapkan dapat menjiwai pembangunan melalui peningkatan objek wisata alam dan sosial, peningkatan komunitas untuk pembangunan, peternakan dan penanaman hewan, peningkatan efisiensi di lapangan sebagai pusat wilayah publik untuk mendapatkan basis kreasi. dan memajukan mempercepat arah sosial. Perekonomian imajinatif, meningkatkan kemampuan industri perjalanan, perikanan dan peternakan, memperkuat hubungan antar pulau dengan perikanan bantu, hewan peliharaan dan industri perjalanan, serta mempercepat pembangunan daerah tertinggal, daerah jalur dan daerah provinsi, memperluas lapangan pekerjaan dan produktivitas pemerintahan di masyarakat kota menengah kecil yang besar untuk meningkatkan daya gotong royong dalam pembangunan kota dan pedesaan serta mempercepat penggunaan Pedoman Minim Pertolongan (SPM). Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masyarakat (RPJMN) 2020-2024, Nusa Tenggara Barat memiliki lima proyek untuk membantu mempercepat perbaikan, mengingat pembangunan kabin dan anak perusahaan mereka untuk Peraturan Sumbawa Barat dan kemajuan Asosiasi Pulau Sumbawa bergabung yang membutuhkan program. Keberatan industri perjalanan (DPP) Mandalika dan Labuhan Bajo, pengembangan Jalan Umum Pulau Sumbawa (kawasan jalan Pototano-Sape), peningkatan SDM Kawasan Moneter Unik Mandalika dan pemajuan Geopark Rinjani dan Tombokan. Kelima proyek tersebut terkait dengan peningkatan jaringan lokal dan landasan keterbukaan serta tugas mendukung industri perjalanan dan peningkatan sumber daya manusia sebagai kemampuan rencana keuangan.

Banyak penelitian telah memeriksa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tambah biaya, namun beberapa penelitian telah mengeksplorasi dampak perkembangan dan pertumbuhan keuangan pada nilai tambah biaya saat menggunakan informasi orang dalam dari pemungutan Divisi Jenderal Pajak. Beberapa pemeriksaan terkait dengan efek pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada harga tambah biaya telah menghasilkan berbagai tujuan.

Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam sehubungan dengan hubungan antara pembangunan ekonomi, inflasi dan nilai tambah biaya. Seperti yang ditunjukkan oleh konsentrasi oleh Mutaqqin dan Halim (2019), perkembangan dan inflasi moneter pada dasarnya mempengaruhi penggunaan nilai tambah yang signifikan, sedangkan konsekuensi dari eksplorasi oleh Mahadiyanto et al. (2018) menduga bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi nilai tambah harga, namun inflasi tidak menunjukkan dampak yang besar. Ananda dan Putri (2022) menemukan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi PPN, sedangkan inflasi menunjukkan dampak negatif dan besar terhadap PPN.

Rumusan Masalah

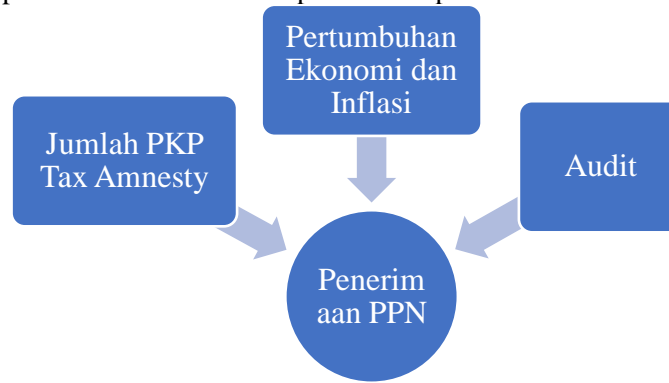
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “ bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian berdasarkan hipotesis dan pemeriksaan sebelumnya:

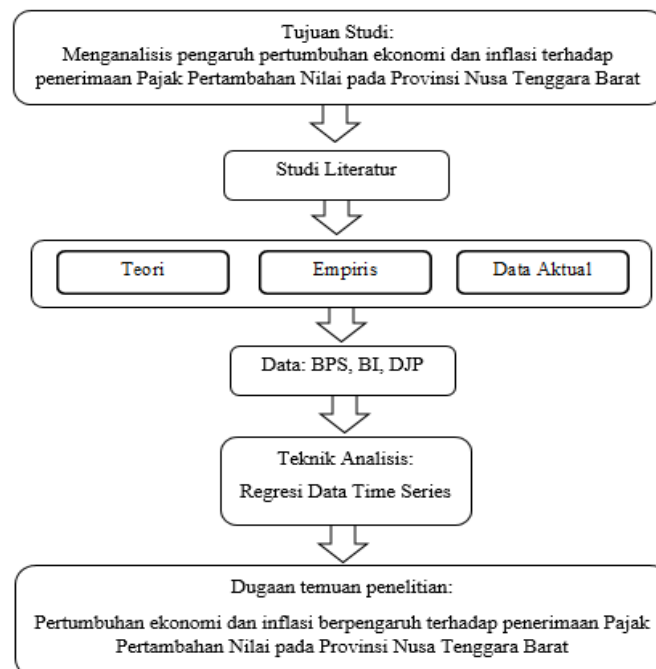


Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Rancangan penelitian menggunakan metodologi kuantitatif menggarisbawahi hubungan kausal, memaknai kekhasan hubungan antara faktor-faktor yang teliti. Metodologi kuantitatif untuk memperkenalkan informasi, memahami suatu peristiwa dengan cara yang lebih dapat diukur dan berorientasi pada hasil, sering kali disertai dengan bukti yang signifikan. Secara khusus, desain penelitian dijelaskan pada Gambar 2.



Gambar 2. Desain penelitian

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengakuan pendapatan biaya tambahan yang signifikan. Apakah pelaksanaan Permohonan Penilaian Nilai Tambah Signifikan dari Kanwil Ditjen Beban Nusa Tenggara KPP Mataram Pratama Barat, KPP Raba Bima Pratama, KPP Pratama Sumbawa Besar Dispen, Dispindik Pratama Mataram Timur dan Dip Pratama Praya Kantor Administrasi adalah 5 Tempat Kerja Administrasi Penilaian yang berada di Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Variabel Independen

Faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Rekor yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi adalah PDB asli wilayah tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui strategi dan langkah untuk mendapatkan semua data penting. Informasi yang dikumpulkan merupakan informasi opsional untuk periode 2011-2022 yang diperkenalkan setiap triwulan. Informasi tentang jumlah Warga Negara yang telah mendapatkan pengakuan sebagai Perencana Bisnis Tersedia, jumlah Warga negara yang mengikuti program pembebasan biaya, jumlah surat perintah peninjauan yang diberikan, jumlah penerimaan angsuran pajak yang telah diperluas diambil dari Divisi Jenderal Pajak. Sedangkan informasi tentang petunjuk ekonomi makro sebagai pertumbuhan ekonomi dan inflasi diperoleh dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan faktor bebas, penting untuk menguji informasi dengan menggunakan strategi ekonometrika. Tinjauan ini menggunakan Autoregressive Disseminated Lag - Mistake Revision Model (ARDL-ECM) bergerak ke arah pemanfaatan sejauh mungkin metode pengujian yang disajikan oleh Pesaran, Shin dan Smith (2001) dengan bantuan Eviews 12 sebagai perangkat penanganan informasi. Tahapan selanjutnya adalah uji stasioneritas, uji kointegrasi antar faktor, penilaian model ARDL terbaik, uji asumsi klasik, dan penilaian hubungan jarak jauh dan transien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Berikut Hasil analisis statistik deskriptif dari seluruh variabel disajikan secara lengkap dalam Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif	PPN	PDRB	IHK	PKP	AUDIT	AMNESTY
Mean	220 miliar	21,5 triliun	125,894	2.004,52	222,062	212,719
Median	148 miliar	22,7 triliun	125,900	2.237,50	190,500	0,00000
Maximum	1,23 triliun	26,2 triliun	160,800	2.405,00	827,000	3.446,00
Minimum	29,1 miliar	160 triliun	103,030	1.026,00	0,00000	0,00000
Std. Dev.	233 miliar	3,21 triliun	15,8010	410,414	193,725	710,513
Skewness	2,31437	-0,45335	0,27694	-1,09149	0,99919	3,33189
Kurtosis	9,48362	1,78036	2,25150	2,7817	3,58974	13,0623
Jarque-Bera	126,925	4,61929	1,73408	9,62604	8,68271	291,310
Probability	0,00000	0,09930	0,42019	0,00812	0,013012	0,00000
Sum	10.6 triliun	1.030 triliun	6042,91	96217,0	10659,0	10.211.0
Sum Sq. Dev.	2.54E+24	4.85E+26	11767,2	0,00812	176389	23.726.96
Observations	48	48	48	48	48	48

Sumber: Olah data EIEWS 12

Informasi yang digunakan adalah informasi time series dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2022 yang disampaikan setiap triwulan dengan tujuan jumlah persepsi sebanyak 48 persepsi. Deviasi menunjukkan tingkat ketidakseimbangan penyebaran di sekitar rata-rata. Faktor yang miring ke kiri disikapi dengan kecondongan yang disesalkan, khususnya PDRB dan PKP, sedangkan faktor lain yang lebih miring ke kanan disikapi dengan kecondongan tertentu. Berbeda dengan miring, kurtosis adalah angka tak berdimensi yang dapat digunakan untuk melihat apakah suatu data berpuncak atau rata dengan distribusi normal. Faktor Tank, Review, dan Reprieve umumnya akan leptokurtic, artinya bagian tengah penyampaian informasi menunjukkan puncak tajam yang dituju oleh kurtosis lebih dari 3 (tiga). Faktor PDRB, IHK dan PKP berubah karena umumnya akan memiliki level top dengan bentuk nilai di bawah 3 (tiga). Kisaran informasi untuk faktor Tangki dan PDRB sangat jauh terpisah, sedangkan faktor Tangki, PDRB dan CPI memiliki unit yang berbeda. Untuk menghindari rentang informasi yang terpisah terlalu jauh dan dapat dihomogenkan dalam satuan, faktor TVA, PDRB, dan CPI dialihkan sepenuhnya ke logaritma biasa.

Tabel 2. Analisis Deskriptif setelah dilakukan transformasi data

Analisis Deskriptif	LPPN	LPDRB	LIHK	PKP	AUDIT	AMNESTY
Mean	33,3282	42,1028	4,82776	2.004,52	222,062	212,729
Median	37,2331	41,2619	4,83547	2.237,50	190,500	0,00000
Maximum	39,3520	42,4103	5,08016	2.405,00	827,000	3446,00
Minimum	24,0937	39,7302	4,63502	1.026,00	0,00000	0,00000
Std. Dev.	6,34426	0,49415	0,12517	410,414	193,725	710,513
Skewness	-0,68921	-3,92456	0,07091	-1,09149	0,99919	3,33189
Kurtosis	1,50960	18,3263	2,07262	2,78170	3,58974	13,0623
Jarque-Bera	8,24266	593,007	1,76029	9,62604	8,68271	291,310
Probability	0,01622	0,00000	0,41472	0,00812	0,01302	0,00000
Sum	1.599,75	2.020,93	231,732	96.217,0	10.659,0	10.211,0
Sum Sq. Dev.	1.891,74	11,4768	0,73632	7.916.654	1.763.889	23.726.965
Observations	48	48	48	48	48	48

Sumber: Olah data EVIEWS 12

Setelah mengubah informasi beberapa faktor menjadi logaritma normal (ln), hasilnya seperti pada Tabel 2. Beberapa faktor yang memiliki bentuk puncak leptocurtic, antara lain LPDRB, Review dan Pardon, sedangkan LPPN, LIHK dan PKP lebih sering bersifat platycurtic.

Hasil Analisis

Uji Antar Korelasi

Uji multikolinearitas berarti menentukan kekuatan hubungan antar faktor, baik variabel terikat maupun faktor bebas sehingga terjadi masalah keserempakan dengan faktor-faktor tersebut.

Tabel 3. Uji multikolinearitas

VARIABEL	LPPN	LPDRB	LIHK	PKP	AUDIT	AMNESTY
LPPN	1,000	0,342	-0,485	0,185	0,632	0,223
LPDRB	0,342	1,000	0,042	0,215	0,148	0,127
LIHK	-0,485	0,042	1,000	0,039	-0,185	-0,063
PKP	0,185	0,215	0,039	1,000	0,178	0,030
AUDIT	0,632	0,148	-0,185	0,178	1,000	0,013
AMNESTY	0,223	0,127	-0,063	0,030	0,013	1,000

Sumber: Olah data EVIEWS 12

Uji Stasioneritas Data

Pengujian kesehatan informasi atau secara umum dikenal sebagai pengujian akar unit diharapkan dapat menjamin bahwa informasi tersebut stabil. Masalah umum saat bekerja dengan informasi deret waktu adalah kekambuhan imajiner terjadi saat informasi tidak diperbaiki. Selain itu, uji akar unit juga diharapkan sebelum melakukan uji kointegrasi menggunakan strategi uji terhubung ARDL. Mengetahui permintaan akhir untuk setiap variabel adalah signifikan. Strategi uji kointegrasi dengan uji imperatif mengharuskan informasi berhenti pada (I(0)) atau perbedaan utama (I(1)).

Kajian ini melibatkan dua metodologi dalam pengujian stasioneritas informasi, yaitu Expanded Dickey-Fuller (ADF) dan Phillips-Perron (PP) Test. Hasil percobaan ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Stasioneritas Data

VARIABEL	ADF at Level (AIC)			ADF at 1st Diff (AIC)		
	None	Dengan Intersep	Dengan Intersep dan Tren	None	Dengan Intersep	Dengan Intersep dan Tren
LPPN	0,762	0,280	0,156	0,000***	0,000***	0,000***
LPDRB	0,735	0,000***	0,000***	0,000***	0,000***	0,000***
LIHK	0,537	0,351	0,247	0,000***	0,000***	0,000***
PKP	0,500	0,860	0,983	0,000***	0,000***	0,000***
AUDIT	0,524	0,057*	0,032**	0,000***	0,000***	0,000***
AMNESTY	0,000***	0,002***	0,0010***	0,000***	0,000***	0,000***

VARIABEL	PP at Level			PP at 1st Diff		
	None	Dengan Intersep	Dengan Intersep dan Tren	None	Dengan Intersep	Dengan Intersep dan Tren
LPPN	0,882	0,354	0,182	0,000***	0,000***	0,000***
LPDRB	0,842	0,000***	0,000***	0,000***	0,000***	0,000***
LIHK	0,524	0,351	0,247	0,000***	0,000***	0,000***
PKP	0,498	0,803	0,992	0,000***	0,000***	0,000***
AUDIT	0,198	0,057*	0,042**	0,000***	0,000***	0,000***
AMNESTY	0,000***	0,002**	0,009***	0,000***	0,000***	0,000***

*: signifikan pada tingkat 10%, **: signifikan pada tingkat 5%, ***: signifikan pada tingkat 1%

Sumber: Olah data EViews 12

Konsekuensi pengujian ADF dan PP menunjukkan bahwa faktor LPDRB, Peninjauan dan Pembebasan berhenti pada (I(0)) sedangkan faktor LPPN, LIHK dan PKP berhenti pada kontras pertama (I(1)), semua faktor tetap mengatur sesuatu seperti 1 (satu) untuk memenuhi kebutuhan pengujian kointegrasi menggunakan strategi pengujian kebutuhan.

Pemilihan lag optimum

Setiap kali disadari bahwa variabelnya tetap, tahap selanjutnya adalah menentukan panjang lag yang tepat untuk menentukan model ARDL terbaik. Dengan asumsi kelonggaran ideal info terlalu pendek, mungkin ada kekhawatiran bahwa hasil penilaian mungkin tidak sepenuhnya memahami elemen model. Namun, penundaan promosi yang terlalu lama akan menyebabkan evaluasi yang sia-sia karena tingkat peluang yang berkurang (terutama untuk model dengan sedikit contoh). Penulis menggunakan data triwulanan dari 2011-2022 dengan total 48 persepsi untuk menentukan lag terbaik 1-5. Setelah menentukan panjang lag, pencipta menggunakan penilaian vector autoregression (VAR) sebagai alat untuk menguji penggunaan fit lag. Prasyarat informasi variabel eksplorasi adalah untuk berhenti pada kontras tingkat pertama, sehingga memenuhi persyaratan penilaian VAR untuk mengantisipasi model hasil yang signifikan. Konsekuensi dari pemilihan aturan lag length dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pemilihan lag optimum

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-965.8218	NA	5.05e+12*	46.27723	46.52547*	46.36822*
1	-934.8545	51.61220*	6.54e+12	46.51688	48.25455	47.15381
2	-906.1353	39.65979	1.03e+13	46.86359	50.09069	48.04645
3	-869.9892	39.58860	1.38e+13	46.85663	51.57316	48.58543
4	-819.8041	40.62608	1.36e+13	46.18115	52.38711	48.45588
5	-737.7757	42.96722	6.23e+12	43.98932*	51.68471	46.80999

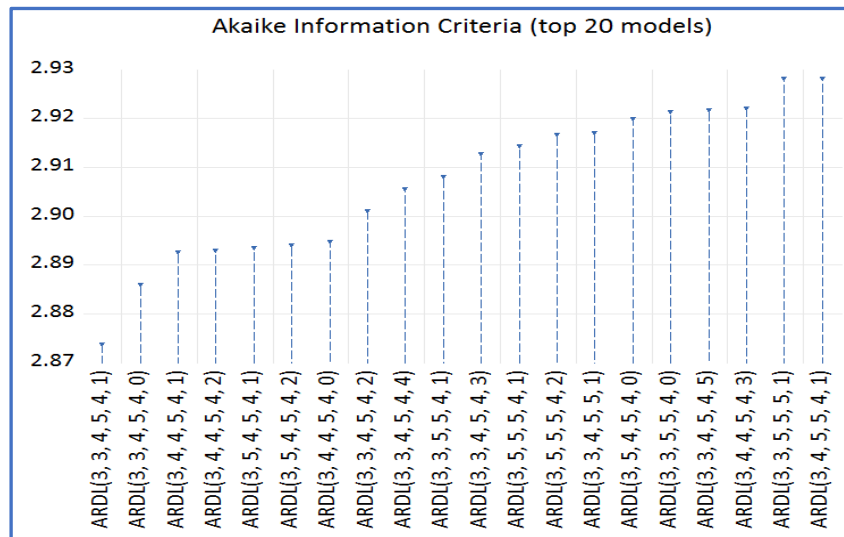
*indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

Sumber: Olah data EViews 12

Mengingat konsekuensi dari penanganan data di atas, panjang kelonggaran yang ideal muncul karena penilaian VAR dengan beberapa data model menunjukkan hasil campuran. Menampilkan VAR dengan konstanta tanpa jeda seperti yang ditunjukkan oleh model FPE, SC dan HQ tidak dapat digunakan karena tidak ada reaksi drive dan faktor yang masuk akal dari perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan nilai Akaike Information Measure (AIC) yang paling rendah yang ditampilkan di lag 5 (lima). Menurut Shibata (1976), Hurvich (1989), dan Liew (2004), penilai AIC lebih baik daripada FPE, SC dan HQ untuk penelitian dengan ukuran contoh kecil. Selain itu, penulis juga akan mempertimbangkan penggunaan lag 4 sebagai ujian, mana yang akan memberikan ukuran terbaik. Sisanya diringkas di bagian referensi ulasan ini.

Pemodelan ARDL-ECM

Setelah mengetahui panjang lag optimum yang dapat digunakan dalam model, tahap selanjutnya adalah menentukan model ARDL terbaik..



Gambar 3. Model lag terbaik berdasarkan AIC (Eviews 12)

Para ilmuwan menggunakan metode Standar Data Akaike (AIC) untuk menentukan model ARDL. Penilaian tersebut menghasilkan Gambar 3 dan Tabel 6 yang menggunakan lag ideal 5 menunjukkan model yang lebih disukai daripada model dengan lag optimum 4.

Tabel 6. Model lag terbaik berdasarkan AIC

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
D(LPPN(-1))	-0.128449	0.076525	-1.678514	0.1127
D(LPPN(-2))	0.099700	0.078487	1.270284	0.2221
D(LPPN(-3))	-0.140653	0.075630	-1.859757	0.0814
D(LPDRB)	3.013052	0.643621	4.681408	0.0003
D(LPDRB(-1))	2.728793	0.700906	3.893239	0.0013
D(LPDRB(-2))	2.534261	0.637809	3.973384	0.0011
D(LPDRB(-3))	4.412069	0.365012	12.08748	0.0000
D(LIHK)	1.865123	2.230254	0.836283	0.4153
D(LIHK(-1))	-15.25142	3.744643	-4.072864	0.0009
D(LIHK(-2))	1.612202	3.296787	0.489022	0.6315
D(LIHK(-3))	2.269363	3.502985	0.647837	0.5263
D(LIHK(-4))	-10.32258	3.533079	-2.921694	0.0100
D(PKP)	0.001509	0.000922	1.636588	0.1212
D(PKP(-1))	-0.008252	0.001821	-4.531704	0.0003
D(PKP(-2))	0.002709	0.001720	1.574928	0.1348
D(PKP(-3))	0.000895	0.001707	0.524690	0.6070
D(PKP(-4))	-0.004756	0.001778	-2.675347	0.0166
D(PKP(-5))	0.010228	0.001339	7.639149	0.0000
D(AUDIT)	0.001876	0.001223	1.534029	0.1446
D(AUDIT(-1))	0.002520	0.001401	1.799454	0.0908
D(AUDIT(-2))	0.000677	0.001371	0.493934	0.6281
D(AUDIT(-3))	0.002904	0.001373	2.115811	0.0504
D(AUDIT(-4))	0.006372	0.001421	4.483016	0.0004

D(AMNESTY)	0.000274	0.000229	1.192925	0.2503
D(AMNESTY(-1))	0.000228	0.000230	0.992290	0.3358
C	0.015819	0.163276	0.096885	0.9240
<i>R-squared</i> 0.924900 <i>Mean dependent var</i> 0.345375				
<i>Adjusted R-squared</i> 0.807556 <i>S.D. dependent var</i> 2.024668				
<i>S.E. of regression</i> 0.888190 <i>Akaike info criterion</i> 2.873752				
<i>Sum squared resid</i> 12.62210 <i>Schwarz criterion</i> 3.949452				
<i>Log likelihood</i> -34.34879 <i>Hannan-Quinn criter.</i> 3.268039				
<i>F-statistic</i> 7.881969 <i>Durbin-Watson stat</i> 2.309253				
<i>Prob(F-statistic)</i> 0.000045				
*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model				

Sumber: Olah data *EViews* 12

Hasil pengolahan data pada Tabel 6, model memiliki koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 92,49% dan *Adjusted R-squared* sebesar 80,76% dengan F-statistik sebesar 7,88 signifikan pada level 1%. Selanjutnya, faktor-faktor otonom secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen dan model dapat masuk akal dari varietas dalam Pendapatan Biaya Pertambahan Nilai sebesar 80,76%, sedangkan sisanya masuk akal oleh faktor-faktor di luar model.

Uji Kointegrasi

Uji ini diharapkan dapat memutuskan hubungan yang ditarik antara faktor. Hasil eksperimen diperkenalkan pada Tabel 7. Nilai F-statistik dari uji tersebut menghasilkan Tabel 7 adalah 25,01 lebih menonjol dari batas atas harga pada tingkat kepentingan 1% dengan contoh 45. Akibatnya H0 dapat dihilangkan, sehingga cenderung disimpulkan ada kointegrasi antara faktor-faktor yang menunjukkan ada hubungan yang ditarik antara faktor-faktor sehingga penilaian yang ditarik harus dimungkinkan.

Tabel 7. Hasil Bound Testing Approaches

<i>F-Bounds Test</i>		<i>Null Hypothesis: No levels relationship</i>		
<i>Test Statistic</i>	<i>Value</i>	<i>Signif.</i>	<i>I(0)</i>	<i>I(1)</i>
<i>F-statistic</i>	25.01289	10%	Asymptotic: n=1000	
			2.26	
			2.62	
			2.96	
			3.41	
<i>K</i>	5	5%	Finite Sample: n=45	
			2.458	
			2.922	
			4.03	
			3.647	
<i>Actual Sample Size</i>	42	10%	Finite Sample: n=40	
			2.483	
			2.962	
			4.045	
			3.708	
<i>t-Bounds Test</i>	-8.857704	10%	<i>Null Hypothesis: No levels relationship</i>	
			I(0)	
			-2.57	
			I(1)	
			-3.86	
		5%	-2.86	
		2.5%	-3.13	
		1%	-3.43	
			-4.19	
			-4.46	
			-4.79	

Sumber: Olah data *EViews* 12

Hasil Estimasi Jangka Panjang

Estimasi Jangka Panjang yang merupakan efek samping dari estimasi jangka panjang diperkenalkan pada Tabel 8. Hasil uji kointegrasi dengan menggunakan strategi uji afiliasi seperti yang digambarkan pada bagian sebelumnya menunjukkan adanya kointegrasi antar faktor. Untuk ini, dimungkinkan untuk membuat estimasi jangka panjang, antara variabel yang bergantung dan otonom. Tabel 4.8 menunjukkan beberapa faktor yang secara berarti mempengaruhi bermacam-macam biaya nilai tambah yang signifikan.

Tabel 8 Hasil penilaian estimasi jangka panjang.

<i>Dependent Variable: D(LPPN)</i>				
<i>Level Equation</i>				
<i>Case 3: Unrestricted Constant and No Trend</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
D(LPDRB)	10.85014	1.778341	6.101272	0.0000
D(LIHK)	-16.95509	6.002266	-2.824781	0.0122
D(PKP)	0.001996	0.001566	1.274776	0.2206
D(AUDIT)	0.012271	0.004457	2.753542	0.0141
D(AMNESTY)	0.000429	0.000318	1.349698	0.1959

Sumber: Olah data *EViews 12*

Ditulis dalam persamaan, maka bentuk model sebagai berikut:

$$D(LPPN) = 10.85014 * D(LPDRB) - 16,95509 * D(LIHK) + 0.001996 * D(PKP) + 0.012271 * D(AUDIT) + 0.000429 * D(AMNESTY)$$

Nilai t-statistik variabel pertumbuhan ekonomi (LPDRB) pada hasil pengujian adalah 6,101, lebih besar dari t-statistik pada $\alpha = 0,01$ yaitu 2,698, sehingga H_0 dapat ditolak. Pertumbuhan ekonomi sebagian berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Dalam jangka panjang, PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1% akan meningkatkan pungutan PPN sebesar 10,85%. Variabel inflasi (LIHK) memiliki t-statistik sebesar 2,825 yang lebih besar dari t tabel pada $\alpha = 0,05 \times 2,018$, sehingga H_0 dapat ditolak. Inflasi parsial berdampak negatif dan signifikan terhadap pemungutan PPN. Dalam jangka panjang, kenaikan inflasi sebesar 1% di Nusa Tenggara Barat akan mengakibatkan penurunan penerimaan PPN sebesar 16,96%. Hasil estimasi jangka panjang juga menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan (AUDIT) berpengaruh signifikan dengan $\alpha = 0,05$ sedangkan variabel pengawasan wajib pajak (PKP) dan kebijakan tax amnesty, program keterbukaan informasi secara sukarela tidak berpengaruh terhadap kinerja jangka panjang. penerimaan dari pajak pertambahan nilai. Nilai F statistik yang diberikan model pada tabel 4.6 adalah 7,88 yaitu 3,49 lebih besar dari nilai F tabel pada $\alpha = 0,01$ yaitu 3,49 sehingga H_0 dapat ditolak. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara bersamaan memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan PPN, namun dengan derajat yang berbeda-beda.

Estimasi Jangka Pendek

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, apabila terjadi kointegrasi antar faktor, maka dapat diketahui keterhubungan antar faktor tersebut. Untuk sementara, hampir pasti, akan ada ketimpangan antar faktor. Mengingat penanganan informasi *Eviews 12*, konsekuensi penilaian hubungan sesaat dari model total harus terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil estimasi jangka pendek

<i>ARDL Error Correction Regression</i>				
<i>Dependent Variable: D(LPPN,2)</i>				
<i>Selected Model: ARDL(3, 3, 4, 5, 4, 1)</i>				
<i>Case 2: Restricted Constant and No Tren</i>				
<i>Date: 07/11/23 Time: 21:35</i>				
<i>Sample: 2011Q1 2022Q4</i>				
<i>Included observations: 42</i>				
ECM Regression				
<i>Case 2: Unrestricted Constant and No Trend</i>				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
C	0.015819	0.120022	0.131802	0.8968
D(LPPN(-1),2)	0.040953	0.072395	0.565687	0.5795
D(LPPN(-2),2)	0.140653	0.056254	2.500330	0.0237
D(LPDRB,2)	3.013052	0.451760	6.669588	0.0000
D(LPDRB(-1),2)	-6.946330	0.584525	-11.88371	0.0000
D(LPDRB(-2),2)	-4.412069	0.283232	-15.57759	0.0000
D(LIHK,2)	1.865123	1.572125	1.186371	0.2528

D(LIHK(-1),2)	6.441010	2.479444	2.597764	0.0194
D(LIHK(-2),2)	8.053213	2.320930	3.469821	0.0032
D(LIHK(-3),2)	10.32258	2.436032	4.237455	0.0006
D(PKP,2)	0.001509	0.000737	2.048887	0.0572
D(PKP(-1),2)	-0.009077	0.001384	-6.556667	0.0000
D(PKP(-2),2)	-0.006368	0.001257	-5.064404	0.0001
D(PKP(-3),2)	-0.005472	0.001297	-4.219336	0.0007
D(PKP(-4),2)	-0.010228	0.001019	-10.03286	0.0000
D(AUDIT,2)	0.001876	0.000840	2.232762	0.0402
D(AUDIT(-1),2)	-0.009953	0.001251	-7.959215	0.0000
D(AUDIT(-2),2)	-0.009276	0.001145	-8.101566	0.0000
D(AUDIT(-3),2)	-0.006372	0.000959	-6.644783	0.0000
D(AMNESTY,2)	0.000274	0.000118	2.311921	0.0344
CointEq(-1)*	-1.169402	0.081401	-14.36588	0.0000
<hr/>				
<i>R-squared</i>	0.964291	<i>Mean dependent var</i>	0.014179	
<i>Adjusted R-squared</i>	0.933452	<i>S.D. dependent var</i>	2.936201	
<i>S.E. of regression</i>	0.757451	<i>Akaike info criterion</i>	2.588038	
<i>Sum squared resid</i>	12.62210	<i>Schwarz criterion</i>	3.415499	
<i>Log likelihood</i>	-34.34879	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	2.891335	
<i>F-statistic</i>	28.35446	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.309253	
<i>Prob (F-statistic)</i>	0.000000			

Sumber: Olah data *EVIIEWS 12*

Konsekuensi dari penilaian ini menunjukkan bahwa setiap faktor bebas dalam model pada lag tertentu mempengaruhi pengakuan Tugas Pertambahan Bernilai Signifikan pada taraf $\alpha = 0,01$ dan $0,05$. Nilai t-statistik variabel perkembangan keuangan (LPDRB) pada hasil eksperimen sesaat lebih penting dari pada t-tabel pada $\alpha = 0,01$ sebesar 2,698 sehingga H_0 dapat dihentikan. Perkembangan keuangan tahun berjalan agak mempengaruhi pendapatan PPN namun di tahun-tahun sebelumnya (panjang 1 dan 2) membuat perbedaan negatif dan besar. Variabel Inflasi (LIHK) pada tahun berjalan memiliki t-ukuran 1,186 yang lebih sederhana dari t-tabel pada $\alpha = 0,1$ sebesar 1,682 sehingga H_0 tidak dapat diabaikan. Inflasi memengaruhi penerimaan PPN, namun di akhir 1-3 itu membuat perbedaan yang positif dan luar biasa. Hasil penilaian sesaat juga menemukan bahwa faktor Peninjauan, PKP dan Pengampunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan Pajak Pertambahan Nilai. Nilai F pengukuran yang ditampilkan pada hasil penilaian sementara adalah 28,354 yang lebih besar dari F tabel pada $\alpha = 0,01$ sebesar 3,49 sehingga H_0 dapat ditolak. Perkembangan dan inflasi moneter secara fundamental memengaruhi pendapatan PPN untuk saat ini.

Indikasi kondisi ECM atau variabel *CoinEq(-1)* negatif dan besar pada $\alpha = 0,01$. Ini lebih lanjut membangun bahwa ada hubungan yang berkepanjangan antara faktor-faktor dan menunjukkan bahwa model sementara tertentu adalah sah. Nilai *Mistake Remedy Term (ECT)* dapat diartikan sebagai kecepatan perubahan dari kondisi sementara ke saldo yang ditarik. Pada model transien seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.9, koefisien ECT adalah 116,94%. Pentingnya koefisien ini adalah bahwa model sementara atau deviasi nilai Bea Pertambahan Nilai Penting (LPPN) yang diakui akan direvisi sebesar 116,94% waktu satu triwulan (sekitar 3,5 bulan) menuju keselarasan jangka panjang.

Konsekuensi dari uji ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan dan tingkat inflasi secara bersamaan memiliki dampak saat ini dan jangka panjang terhadap pengakuan Bea Masuk Nilai Tambah yang Signifikan. Berbagai judul efek pada hasil percobaan sementara akan direvisi selama jangka waktu tertentu menuju keseimbangan jangka panjang.

Uji Asumsi Klasik

Uji homoskedastisitas

Menguji adanya heteroskedastisitas pada penumpukan yang dilakukan oleh Breusch-Agnostic Godfrey Test. Hasil pengujian Tabel 10 menunjukkan bahwa Prob. F-detail 0,9976 lebih menonjol dari $\alpha = 0,1$, sehingga H_0 diabaikan untuk diabaikan. Hasil akhir dari pengujian ini adalah sisanya dibebaskan dari heteroskedastisitas.

Tabel 10. Hasil uji dengan model Breusch-Pagan-Godfrey

<i>Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey</i>			
<i>F-statistic</i>	0.284319	<i>Prob. F(25,16)</i>	0.9976
<i>Obs*R-squared</i>	12.91913	<i>Prob. Chi-Square(25)</i>	0.9775
<i>Scaled explained SS</i>	5.082402	<i>Prob. Chi-Square(25)</i>	1.0000

Sumber: Olah data *EVIIEWS 12*

Uji autokorelasi

Menguji adanya autokorelasi dalam model dengan menggunakan Uji LM Breusch-Godfrey Sequential Connection. Hasil pengujian Tabel 11 menunjukkan bahwa Prob. F-detail 0,9423 lebih menonjol dari $\alpha = 0,1$, sehingga H0 diabaikan untuk diabaikan. Akhir dari pengujian ini adalah residual dibebaskan dari autokorelasi.

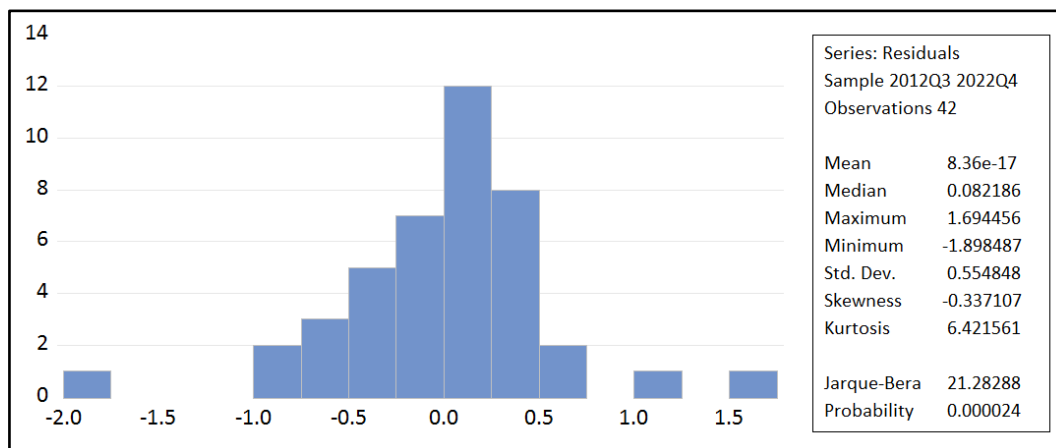
Tabel 11. Hasil uji dengan model Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
<i>F-statistic</i>	0.228475	<i>Prob. F(5,11)</i>	0.9423
<i>Obs*R-squared</i>	3.951435	<i>Prob. Chi-Square(5)</i>	0.5564

Sumber: Olah data *EViews 12*

Uji normalitas

Uji diselesaikan melalui metode Jarque-Bera, khususnya dengan membandingkan nilai Jarque-Bera dan chi-square (χ^2) pada taraf peluang (df) 2 dengan $\alpha = 0,05$.

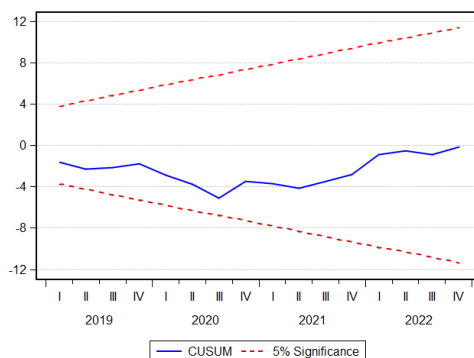


Gambar 4. Grafik distribusi residual (Eviews 12)

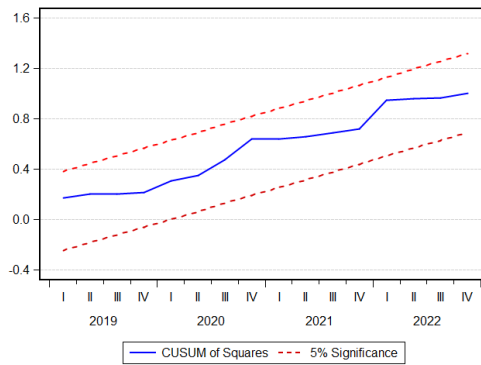
Dilihat dari hasil estimasi Jarque-Bera diperoleh nilai sebesar 21,28288 seperti yang ditampilkan pada Gambar 3. Nilai chi-squared dengan tingkat peluang (df) 2 untuk $\alpha = 0,05$ adalah 5,99146. Karena harga Jarque-Bera lebih menonjol daripada nilai chi-kuadrat ($21,28288 > 5,99146$), cenderung dianggap bahwa residu biasanya tidak disebarluaskan. Pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat nilai kemungkinan Jarque-Bera berikutnya. Nilai kemungkinan berikutnya di bawah 0,05, dan itu menyiratkan bahwa residu biasanya tidak disesuaikan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh ketidakberesan informasi yang atributnya sama sekali berbeda dengan informasi secara keseluruhan. Hal ini sepenuhnya dapat dibayangkan mengingat informasi deret waktu yang digunakan adalah dari tahun 2011-2022, ketika keadaan ekonomi Indonesia secara umum dipengaruhi oleh pandemi virus Corona pada pertengahan tahun 2020, sehingga informasi Produk Domestik Bruto asli jauh dari normal. Selain itu, ketidakpuasan terhadap anggapan kebiasaan juga dapat disebabkan oleh sedikitnya persepsi, mengingat jumlah persepsi dalam penelitian ini adalah 48 persepsi.

Uji stabilitas

Uji stabilitas dengan menggunakan *CUSUM* menunjukkan bahwa model berada dalam batas nilai dasar 5% yang menunjukkan bahwa model ARDL-ECM stabil. Begitu pula dengan uji ketergantungan menggunakan *CUSUM of Square*. Hasil pengujian diperkenalkan pada Gambar 5 dan 6.



Gambar 5. Grafik CUSUM (Eviews 12)



Gambar 6. Grafik CUSUM of Square (Eviews 12)

Pembahasan

Dilihat dari hasil pemeriksaan informasi, terlihat bahwa perkembangan keuangan (LPDRB) dan laju pertumbuhan (LIHK) memiliki pengaruh saat ini dan jangka panjang terhadap pengakuan Tugas Pertambahan Nilai Penting (LPPN). Faktor kontrol lainnya, termasuk jumlah pengusaha yang tersedia (PKP) adalah variabel pengawasan biaya dan strategi pengampunan (*Reprive*) yang hanya memiliki dampak sesaat, daripada pemolisian, khususnya tinjauan biaya (*Review*) yang secara signifikan mempengaruhi saat ini dan jangka panjang.

Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi 1% pada PDRB asli di Wilayah Nusa Tenggara Barat meningkatkan pendapatan PPN sebesar 10,85% dalam jangka panjang. Konsekuensi dari penelitian ini sesuai hipotesis bahwa kecepatan kemajuan moneter yang tercermin dalam perkembangan PDB (Produk domestik bruto) menunjukkan peningkatan pembayaran per kapita sehingga individu siap secara finansial untuk mengkonsumsi dan menutup biaya (Arsyad). (2010). Hasil eksplorasi tersebut sesuai dengan Bikas (2013), Castro dan Camarillo (2014), Nurfajrian (2019) dan Kunwari (2022). Evaluasi sementara membuat perbedaan alternatif. Item publik bruto asli tahun sebelumnya menyebabkan inflasi negatif dalam pengakuan biaya transaksi. Kapan pun terkait dengan pemahaman warga mungkin menafsirkan pedoman penilaian dinamis dan kecenderungan warga untuk menghindari pengeluaran untuk memperluas manfaat (Allingham dan Sandmo 1972), faktor ekonomi mikro tidak dicoba dalam ulasan ini, dampak ini sangat koheren. Mengajar warga tentang organisasi muatan dan keunggulan formatifnya memperkuat budaya dan etika warga, yang selanjutnya memperluas konsistensi yang disengaja (OECD, 2021). Selain itu, sesuai dengan hipotesis sistem miring yang sulit dipahami (Kircler 2008), kepercayaan terbuka yang rendah pada spesialis muatan mengurangi konsistensi muatan, yang dapat diandalkan dengan Alm et al. (2016) mengungkapkan bahwa debasement memberdayakan penghindaran dan penghindaran pajak.

Inflasi

Kenaikan inflasi sebesar 1 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurunkan pajak penjualan sebesar 16,95 persen dalam jangka panjang. Secara teori, kenaikan harga sementara secara keseluruhan tanpa peningkatan pendapatan mengurangi daya beli masyarakat dan mengurangi konsumsi (Mankiw 2016). Secara psikologis, perilaku konsumen lebih sensitif terhadap kenaikan harga daripada kenaikan pendapatan, sehingga mereka cenderung mengurangi pengeluaran dan menambah tabungannya terlebih dahulu. Menurut penelitian Ananda dan Putri (2022), penurunan konsumsi akibat kenaikan harga berpengaruh negatif terhadap realisasi PPN (Halim, et al. 2022).

Namun hasil kajian juga menunjukkan bahwa menurut kajian Mahadianto (2018), kenaikan harga tahun berjalan tidak memberikan pengaruh jangka pendek terhadap realisasi penerimaan PPN, sedangkan kenaikan harga tahun sebelumnya mempercepat realisasi Arvo. Tambahan pendapatan pajak Renata et al. menurut penelitian. (2016) dan Kunwar (2022). Jika dicermati dengan pendekatan inflasi berdasarkan teori kuantitas uang, realisasi inflasi PPN dapat meningkat dalam jangka pendek. Inflasi masih sama dengan pemajakan uang yang disimpan (pajak inflasi), yang disertai dengan ekspektasi kenaikan harga dan cara berpikir tentang nilai waktu dari uang. Tak perlu dikatakan bahwa konsumen meningkatkan konsumsi mereka daripada menabung. Membebaskan PPN pada setiap harga nominal barang dan jasa meningkatkan penghasilan PPN.

Dampak inflasi pada realisasi berbagai pendapatan PPN yang berbeda sejak perilaku pembelanja dan asumsi inflasi memengaruhi pemanfaatan (Ehrmann et al. 2017). Temuan ini memiliki konsekuensi signifikan bagi otoritas publik dalam pendekatan perencanaan sehubungan dengan kedatangan angka inflasi, yang dapat menerangi asumsi inflasi pelanggan dan berdampak pada perilaku pembeli.

Kebijakan di Bidang Perpajakan

Peneliti menganalisis beberapa faktor yang terkait dengan strategi interior Direktorat Jenderal Tugas, termasuk pengaturan pemeriksaan untuk jumlah Pengusaha Tersedia yang terdaftar, mengawasi jumlah perintah peninjauan yang diberikan, strategi penangguhan biaya untuk jumlah warga negara yang berpartisipasi dalam program. Dalam jangka panjang, kontrol yang adil jelas memengaruhi pengakuan biaya transaksi, sementara jumlah visioner bisnis yang tersedia dan pengampunan biaya tidak membuat perbedaan. Dengan menambah jumlah cek, realisasi pajak penjualan dapat ditingkatkan sebesar 1,2%. Dalam jangka panjang, peningkatan kontrol tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Wajib Pajak lainnya dan akan meningkatkan kewajiban perpajakannya.

Berbagai dampak yang terlihat dalam jangka pendek dapat dikaitkan dengan pedoman penilaian dinamis. Sejak 1 Januari 2014 (197/PMK.03/2013), ambang batas sertifikasi pemilik usaha kecil sebagai pemilik usaha kena pajak berubah dari 600 juta rupiah menjadi 4,8 miliar rupiah, yang menyebabkan penurunan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Selain itu, ada Putusan MA No. 70P/HUM/2013 yang mengatur bahwa hasil perkebunan yang sebelumnya merupakan barang strategis yang dibebaskan dari pajak, dikenakan PPN dan tarif PPN dinaikkan mulai 1 April 2022. tidak bisa diverifikasi.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian mengenai pengaruh perkembangan dan inflasi keuangan terhadap pendapatan Tank di Wilayah Nusa Tenggara Barat dari tahun 2011 hingga 2022 dengan menggunakan teknik ARDL-ECM menunjukkan bahwa:

1. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penjualan.
2. Inflasi berpengaruh negatif parsial dan signifikan dalam jangka panjang terhadap penerimaan PPN.
3. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara bersamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN, meskipun dengan derajat yang berbeda.

Saran

Manfaat dari penelitian ini, selain memanfaatkan informasi ekonomi makro juga memanfaatkan informasi data internal Ditjen Pajak sebagai jumlah visioner bisnis yang tersedia, jumlah ulasan dan jumlah warga yang mengikuti program penangguhan biaya, namun secara sederhana siap menilai dampak perkembangan moneter dan inflasi pada konsekuensi pendapatan Tank secara sementara, khususnya dari satu kuartal ke kuartal lainnya. pertama pada tahun 2011 hingga kuartal terakhir tahun 2022 (48 persepsi), oleh karena itu para ilmuwan harus mengabaikan anggapan kewajaran yang tidak terpenuhi dalam ulasan ini. Perbedaan terhadap dampak hasil evaluasi jangka panjang dan sementara dapat dibayangkan karena pemeriksaan tersebut tidak mempertimbangkan faktor sosial dan moral warga yang keluar dari pendidikan dan tingkat kepercayaan warga yang bertanggung jawab terhadap para ahli, serta pelanggan dan asumsi inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, Michael G., dan Agnar Sandmo. (1972). 'Income tax evasion: a theoretical analysis'. *Journal of Public Economics* 1: 323-338.
- Alm, James. (2012). 'Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies'. *Int Tax Public Finance* 19: 54-77.
- Ángeles Castro, G., dan Ramírez Camarillo, D. B. (2014). 'Determinants of tax revenue in OECD countries over the period 2001–2011'. *Contaduría y Administración*, 59(3): 35–59.
- Arsyad, Lincoln. (2016). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Bikas, E., dan Andruskaite, E. (2013). 'Factors Affecting Value Added Tax Revenue'. *1st Annual International Interdisciplinary Conference*: 41–49..
- Ehrmann, Michael., Damjan Pfajfar dan Emiliano Santoro. (2017). 'Consumers' Attitudes and Their Inflation Expectations'. *International Journal of Central Banking*, Vol. 13 No. 1: 225-258.
- Febryandhie Ananda dan Diana Putri (2021). 'The Effect Of Inflation And Economic Growth On Value Added Taxes At The Pratama Tax Service Office 2016-2019'. *Jurnal Pundi*, Vol. 06, No. 01: 119-128.
- Gangl, Katharina, Eva Hofmann, dan Erich Kirchler. (2015). 'Tax Authorities Interaction with Taxpayers: A Conception of Compliance in Social Dilemmas by Power and Trust'. *New Ideas on Psychology* 37: 13-23.

- Hurvich, C.M dan Tsai, C.L. (1989). 'Regression and Time Series Model Selection in Small Samples'. *Biometrika*, 76: 297-307.
- Keshar Bahadur Kunwar. (2022). 'Impact of Macroeconomic Variables on Value Added Tax in Nepal: An Error Correction Model'. *Journal of Tikapur Multiple Campus*, Vol.5: 1-13.
- Kirchler, E., Hoelzl, E. and Wahl, I. (2008). 'Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework'. *Journal of Economic Psychology*, 29: 210-225.
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2011-2022. <https://pajak.go.id/>.
- Liew, Venus Khim-Sen. (2004). 'Which Lag Length Selection Criteria Should We Employ?' *Economics Bulletin*, Vol. 3, No. 33: 1-9
- Mahadianto, Moh Yudi, Nelia Fariani Siregar, Dewi Budi Rahayu, Arinal Muna, dan Ayatulloh Michael Musyaffi. (2018). 'Could Economic Growth and Inflation Affect the Acceptance of Value Added Taxes?' *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 65: 376-381.
- Mankiw, N. Gregory. (2016). *Makroekonomics*. New York: Worth Publisher
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muttaqin, Faisal dan Rizal Edy Halim. (2019). 'The Effect of Economic Growth and Inflation on Tax Revenue: Analysis on Areas with Dominant Economic'. *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 135: 27-33.
- Nurfajriani, Saefi. (2019). 'Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tegal'. Universitas Pancasakti, Tegal.
- OECD. (2022). 'Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022: Strengthening Tax Revenues in Developing Asia'. *OECD Publishing*, Paris.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 20 Desember.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. 17 Januari.
- Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Richard J. Smith. (2001). 'Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships'. *Journal of Applied Econometrics*, Vol. 16 No. 3: 289-326.
- Phelps, E. S. (1961). 'The Golden Rule of Accumulation: A Fable for Growthmen'. *The American Economic Review*, Vol. 51, No. 4: 638-643.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. 25 Februari.
- Renata, Almira H., Kadarisman Hidayat dan Bayu Kaniskha (2016). 'Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I)'. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, vol. 9, no. 1: 1-9.
- Shibata, Ritei. (1976). 'Selection of the order of an autoregressive model by Akaike's information criterion', *Biometrika*, Volume 63, Issue 1: 117-126.
- Subagyo, Hamam and Astri Warih Anjarwi (2021). 'Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan PPN'. Universitas Brawijaya, Malang.
- Todaro, M., dan SC. Smith. (2008). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Undang-undang Perpajakan. 29 Oktober.